



**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
JUMLAH INDUSTRI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**IKA HERAWATY RANGKUTY
1715210159**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DI KOTA MEDAN

NAMA : IKA HERAWATY RANGKUTY
N.P.M : 1715210159
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
TANGGAL KELULUSAN : 20 September 2022

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. E. Rusladi, SE., M.Si.

Dr. E. Bakhtiar Efendi, SE., M.Si.

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

DISETUIJI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. E. Rusladi, S.E., M.Si., CIQaR., CICnR., CIMMR.

Dr. E. Bakhtiar Efendi, SE., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKA HERAWATY RANGKUTY
NPM : 1715210159
Fakultas : Sosial Sains
Proram Studi : Ekonomi Pembangunan
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENYEDIAAN
LAPANGAN KERJA DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



IKA HERAWATY RANGKUTY

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Herawaty Rangkuty
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 09-09-1995
NPM : 1715210159
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Gampong Cot Mancang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



YAYASAN PROF. DR. H. KADAR IKA HERAWATY RANGKUTY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah industri terhadap penyediaan lapangan kerja di kota Medan. Dimana terdapat dua variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia dan lapangan kerja. Terdapat lima variabel bebas yaitu PDRB, jumlah industri, jumlah penduduk, upah dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau time series yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Regresi Simultan. Terdapat satu variabel untuk hasil simultan yang menunjukkan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yaitu PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk pengaruh terhadap lapangan kerja, terdapat dua variabel untuk hasil simultan yang menunjukkan pengaruh terhadap lapangan kerja yaitu jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap lapangan kerja dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap lapangan kerja.

Kata kunci: **Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Lapangan Kerja**



ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of economic growth and the number of industries on the provision of employment in the city of Medan. Where there are two dependent variables, namely the human development index and employment. There are five independent variables, namely GRDP, number of industries, population, wages and local revenue. This study uses secondary data or time series, from 2015 to 2021. The data analysis model in this study uses the Simultaneous Regression method. There is one variable for simultaneous results that shows the effect on the human development index, namely GRDP and has a positive and significant effect on the human development index. For the effect on employment, there are two variables for simultaneous results that show the effect on employment, namely the number of residents has a negative and significant effect on employment and wages have a positive and significant effect on employment.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product, Number of Industries, Number of Population, Wages, Regional Original Income, Human Development Index, Employment*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DI KOTA MEDAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Skripsi ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi dan informasi bagi semua pihak. Skripsi ini merupakan hasil maksimal yang dapat dikerjakan penulis dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun dengan segala keterbatasan yang ada diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Selama proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, semua kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., M.Si, CIQaR, CICnR, CIMMR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak Dr. E Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., M.Si, CIQaR, CICnR, CIMMR, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. E Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada seluruh Dosen dari Prodi Ekonomi Pembangunan, terima kasih tak terhingga atas segala ilmu yang baik dan bermanfaat bagi penulis.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Alm Abdul Mahad Rangkuti dan Ibunda Daminah Hasibuan yang telah memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, doa yang tidak terbatas, serta dukungan material maupun spiritual.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan terima kasih atas motivasi yang selalu mengalir dan pelajaran yang sangat berarti bagi penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Mei 2022

(Ika Herawaty Rangkuty)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian dan Novelty Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Landasan Teori.....	16
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Konseptual.....	48
D. Hipotesis.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	51
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan Penelitian.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha	5
Tabel 1.2.	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	5
Tabel 1.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan.....	8
Tabel 1.4.	Jumlah Industri Kota Medan	9
Tabel 1.5.	Keaslian Penelitian.....	15
Tabel 2.1.	Penelitian Sebelumnya	46
Tabel 3.1.	Skedul Proses Penelitian	51
Tabel 3.2.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	53
Tabel 3.3.	identifikasi Persamaan	59
Tabel 4.1.	Perkembangan Lapangan Kerja (Unit) di Medan Tahun 2015-2021	65
Tabel 4.2.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (%) di Medan Tahun 2015-2021	66
Tabel 4.3.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) di Medan Tahun 2015-2021	68
Tabel 4.4.	Perkembangan Jumlah Industri Besar dan Sedang di Medan Tahun 2015-2021	69
Tabel 4.5.	Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) di Medan Tahun 2015-2021	71
Tabel 4.6.	Perkembangan Upah Minimum (Rupiah) di Medan Tahun 2015-2021	72
Tabel 4.7.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah) di Kota Medan Tahun 2015-2021	74
Tabel 4.8.	Uji Normalitas Residual IPM dan LK.....	75
Tabel 4.9.	Uji Linearitas Persamaan I.....	76
Tabel 4.10.	Uji Linearitas Persamaan II.....	76
Tabel 4.11.	Uji Multikolinearitas Persamaan I	77
Tabel 4.12.	Uji Multikolinearitas Persamaan II	78
Tabel 4.13.	Uji Autokorelasi	79
Tabel 4.14.	Hasil Estimasi Persamaan <i>Two-Stage Least Squares</i>	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan 2015-2021	7
Gambar 1.2.	Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	10
Gambar 2.1.	Kerangka Konseptual	48
Gambar 4.1.	Lapangan Kerja di Medan Tahun 2015-2021	65
Gambar 4.2.	Indeks Pembangunan Manusia di Medan Tahun 2015-2021	67
Gambar 4.3.	Produk Domestik Regional Bruto di Medan Tahun 2015-2021	68
Gambar 4.4.	Jumlah Industri di Medan Tahun 2015-2021	70
Gambar 4.5.	Jumlah Penduduk di Medan Tahun 2015-2021	71
Gambar 4.6.	Upah Minimum di Medan Tahun 2015-2021	72
Gambar 4.7.	Pendapatan Asli Daerah di Medan Tahun 2015-2021	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah selalu berupaya agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk yang produktif dan siap bekerja. Permasalahan yang timbul di setiap pemerintah daerah yaitu minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya hal ini tentu berdampak pada menurunnya tingkat perekonomian dan kesejahteraan daerah tersebut. Menurut sensus penduduk, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan / usaha / perusahaan / kantor / tempat seseorang bekerja (Badan Pusat Statistik). Permintaan seorang pengusaha mempekerjakan seseorang dimaksudkan untuk membantu memproduksi barang dan jasa yang akan dijual ke masyarakat atau konsumen. Maka sifat dari fungsi permintaan tersebut tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut.

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu nikmat (*utility*) kepada si pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena memproduksi

barang untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya.

Salah satu kebijaksanaan kesempatan kerja adalah mengadakan identifikasi terperinci, tidak hanya mengenai jumlah angkatan kerja, melainkan juga lokasi dan penggolongan menurut lingkungan hidup, persebaran antara daerah, antar sektor, antar kota/pedesaan dan sebagainya. Kebijakan negara dalam lapangan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing.

Bertitik tolak dari kebijaksanaan tersebut maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, Departemen Tenaga Kerja dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memandang perlu untuk menyusun program yang mampu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riyadi Nurohman (2011) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan lapangan kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan penyediaan lapangan kerja rendah. Pemerintah daerah selalu berupaya agar dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing. Keberhasilan suatu kepala pemerintah daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi suatu

daerah maka dapat dijadikan indikator bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan taraf hidup perekonomian daerahnya sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi malah menurun maka dapat dipastikan bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan program peningkatan untuk kemakmuran daerahnya.

Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan adanya kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan diikuti oleh peningkatan kemakmuran masyarakat yang biasanya dilihat dari pendapatan domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amri, 2017).

Faktor industri menjadi penting dalam rangka meningkatkan penyediaan lapangan kerja di suatu daerah. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan meningkatnya jumlah industri maka lapangan kerja akan terbuka bagi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi nilainya dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih. Industri mempunyai dua pengaruh yang penting dalam setiap program pembangunan. Produktivitas yang lebih besar dalam industri merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, definisi dari industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara (Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, 2010). Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa nilai keunggulan dibandingkan sektor lain. Keunggulan tersebut dikarenakan nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input produksi yang diolah (Muhtamil, 2017). Menurut Arsyad (2010), industri mampu berperan sebagai *leading sector*. Adanya pembangunan di sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.

Salah satu kota yang sedang menghadapi permasalahan dalam ekonomi pembangunan yaitu Kota Medan dengan jumlah penduduk yang cukup besar masalah yang ditimbulkan pemerintah daerah yaitu bagaimana meningkatkan lapangan kerja untuk menjamin tingkat perekonomian masyarakatnya.

Terbatasnya lapangan kerja merupakan masalah yang harus diselesaikan pemerintah kota Medan dalam era globalisasi ini. Semakin berhasil pemerintah Kota Medan dalam menyediakan lapangan kerja maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan tentu kesempatan kerja akan meningkat dan juga dapat mengurangi tingkat kriminalitas yang

tinggi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah industri terhadap tingkat lapangan kerja di kota Medan. Berikut disajikan persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha dan Kota Medan (Persen).

Tabel 1.1. Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha

Tahun	Sektor		
	Jasa	Industri	Pertanian
2016	75,50	20,60	3,90
2017	80,93	14,38	4,69
2018	76,77	19,13	4,11
2019	75,06	19,73	5,21
2020	73,54	22,77	3,69

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan pada data di atas dapat dilihat bahwasannya penduduk usia kerja di sektor jasa yang paling tinggi sebesar 80,93%, sedangkan di sektor industri sebesar 22,77% dan di sektor pertanian sebesar 5,21%.

Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Medan tahun 2017-2020.

Tabel 1.2. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja

Tahun	Tingkat Partisipasi
2020	63,62
2019	64,89
2018	65,99
2017	64,35

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan pada Data BPS di atas dapat dilihat bahwasannya tingkat partisipasi tenaga kerja Kota Medan di tahun 64,35% yang meningkat di tahun 2018 menjadi 65,99%, di tahun 2019 menurun menjadi 64,89% dan di tahun 2020 terjadi penurunan partisipasi tenaga kerja menjadi 63,62%. Menurunnya tingkat partisipasi kerja menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja di Kota Medan terjadi penurunan. Penurunan lapangan kerja

menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi kerja karena kuota penerimaan tenaga kerja yang menurun.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya penyerapan tenaga kerja yaitu kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Upaya peningkatan IPM tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah pada belanja daerah untuk sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Kota Medan pada tahun 2020 sebesar 71,77%. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Kota Medan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan 2015-2021

Gambar 1.1. terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM di Kota Medan dari tahun 2015-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,8 persen per tahun. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Medan. Pada tahun 2021, capaian IPM di Medan sudah mencapai 81,21. Angka ini meningkat 0,23 poin dari capaian pada tahun 2020 yang sebesar 80,98.

Adapun faktor penting yang dapat berpengaruh pada menurunnya lapangan kerja yaitu yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pemerintah daerah selalu berupaya agar dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya

masing- masing. Keberhasilan suatu kepala pemerintah daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka dapat dijadikan indikator bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan taraf hidup perekonomian daerahnya sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi malah menurun maka dapat dipastikan bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan program peningkatan untuk kemamkmuran daerahnya.

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Dalam ekonomi pembangunan tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan perekonomian. *Stake holder* yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan ekonomi yaitu pemerintah dan masyarakat secara umum

Karena pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan

Tahun	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2015	124.269.931,39
2016	132.062.863,52
2017	139.739.341,78
2018	148.007.137,48
2019	156.780.580,88
2020	153.669.775,83
2021	157.689.186,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan pada Tabel 1.3. laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, 2015 - 2021 bahwa pertumbuhan perekonomian Kota Medan di tahun 2016 mengalami peningkatan dari 124.269.931,39 Miliar Rupiah menjadi 132.062.863,52 Miliar Rupiah. Lalu pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto mengalami penurunan dari 156.780.580,88 Miliar Rupiah menjadi 153.669.775,83 Miliar Rupiah. Tahun 2021 PDRB di Kota Medan mengalami kenaikan menjadi 157.689.186,50 Miliar Rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan dan cenderung stagnan menunjukkan bahwa laju ekonomi Kota Medan bergerak tidak cukup baik sehingga dapat digambarkan bahwa perekonomian Kota Medan tidak terjadi perubahan sama sekali sehingga kurang dirasakan dampaknya pada perekonomian masyarakat secara luas di Kota Medan.

Faktor jumlah industri menjadi faktor kuat dalam mempengaruhi jumlah lapangan kerja.

Tabel 1.4. Jumlah Industri Kota Medan

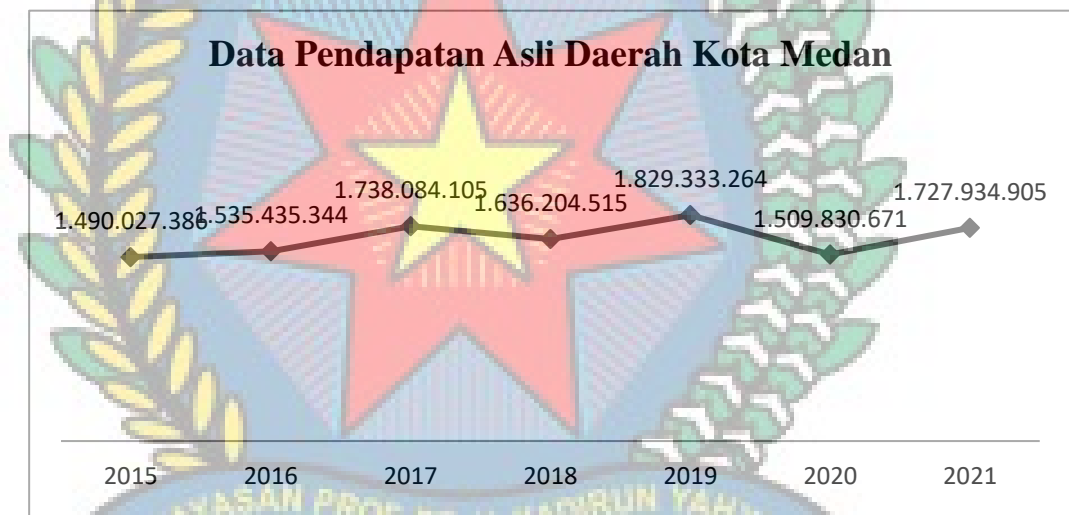
Tahun	Jumlah Industri
2015	960
2016	1.545
2017	1.256
2018	1.256
2019	1.290
2020	1.292
2021	1.301

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan pada data di atas dapat dilihat jumlah industri di Kota Medan yang mana terjadi peningkatan jumlah industri di tahun 2016 menjadi 1.545 dan di tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Lalu dari

tahun 2017 sampai tahun 2021 jumlah industri di kota Medan selalu meningkat. Menurunnya jumlah industri dapat menjadi penyebab menurunnya jumlah lapangan kerja karena banyaknya industri yang tidak beroperasi.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi angka penyerapan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia yaitu Pendapatan Asli Daerah. Berikut disajikan Grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2015-2021.



Gambar 1.2. Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada Grafik Pendapatan Asli Daerah di atas dapat dilihat bahwa realisasi PAD pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dari 1.490.027.386 Miliar Rupiah menjadi 1.535.435.344 Miliar Rupiah. Lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.636.204.515 Miliar Rupiah. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 1.829.333.264 Miliar Rupiah. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.509.830.671 Miliar Rupiah. Tahun

2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 1.727.934.905 Miliar Rupiah. Realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang menurun menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pendapatan asli daerah yang rendah sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah karena menurunnya jumlah uang kas daerah dalam rangka merealisasikan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Hal ini tentunya menjadi suatu fenomena masalah yang menggambarkan penurunan penyerapan anggaran belanja dalam rangka meningkatkan proses pembangunan ekonomi bagi pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Kota Medan.

Berdasarkan uraian serta pemikiran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Industri Terhadap Penyediaan Lapangan Kerja Di Kota Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menurunnya tingkat partisipasi kerja menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja di Kota Medan terjadi penurunan. Penurunan lapangan kerja menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi kerja karena kuota penerimaan tenaga kerja yang menurun.

- 
- b. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan bergerak stagnan dan cenderung tidak ada pertumbuhan yang signifikan sehingga tidak ada dampak sosial ekonomi secara signifikan yang dirasakan masyarakat Kota Medan.
 - c. Menurunnya jumlah industri dapat menjadi penyebab menurunnya jumlah lapangan kerja karena banyaknya industri yang tidak beroperasi.
 - d. Pertumbuhan Jumlah penduduk tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja.
 - e. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan menjadi fenomena masalah sosial ekonomi karena tidak diikuti oleh pembukaan lapangan kerja dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam membuka lapangan pekerjaan.
 - f. Jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan jumlah lapangan kerja yang ada di kota Medan.
 - g. Masih rendahnya pendapatan asli daerah dalam memberikan kontribusi pada tingkat kemandirian pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuannya, yaitu dengan menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri,

Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Lapangan Kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Lapangan Kerja.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis apakah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Untuk menganalisis Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Lapangan Kerja.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah Indeks Pembangunan Manusia dan Lapangan Kerja kota Medan.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi informasi kepada pihak pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Lapangan Kerja kota Medan.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Lapangan Kerja Kota Medan.

E. Keaslian dan Novelty Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Riyadi Nurohman (2011) yang berjudul : “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Industri Terhadap Penyediaan Lapangan Kerja Di Kota Medan”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5. Keaslian Penelitian

Perbedaan	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Ini
Variabel Penelitian	Variabel Bebas : Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Variabel Terikat : Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Variabel Bebas : Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Lapangan Kerja
Waktu Penelitian	2011	2021
Model Penelitian	Regresi linier sederhana	Metode Simultan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Grand Theory

Grand Theory pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori ini berada di level makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. Dengan demikian grand theory dapat disebut sebagai teori keseluruhan atau teori secara garis besar yang menjelaskan suatu permasalahan atau kasus.

2. Middle Theory

Middle-range theory dikemukakan oleh sosiolog amerika Robert Merton dalam '*Social theory and social Structure*' (1957) untuk menghubungkan pemisah diantara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori-teori besar yang abstrak yang diciptakan Talcott Parson. Dia menjelaskan middle-range theory sebagai teori yang berbohong diantara minor-minor tapi diperlukan hipotesis yang berkembang dalam keadaan yang berlimpah dalam penelitian selama sehari-hari hingga diperlukan usaha-usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan seluruh penelitian yang seragam dari perilaku sosial, organisasi dan perubahan sosial. Banyak konsep yang dikembangkan dari mid-range theories telah menjadi bagian dari kosakata dasar sosiologi : *retreatisme, ritualisme, manifest dan latent functions, opportunity structure, paradigma,*

reference group, role-sets, self-fulfilling prophecy dan *unintended consequence*. Pemikiran middle-range theory secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pandangan sosiologi atas pekerjaan mereka.

Teori ini dipergunakan sebagai hipotesis yang patut diuji, bukan sebagai perangkat pengatur studi hubungan internasional. Objek yang ditelusuri jauh diluar bidang perhatian kelompok tradisional, perhatian lebih jauh ditujukan pada hukum internasional, organisasi internasional, serta peristiwa yang sedang berlangsung. Middle-range theory disepakati sebagai suatu bidang yang relatif luas dari suatu fenomena, tapi tidak membahas keseluruhan fenomena dan sangat memperhatikan kedisiplinan (*Chinn and Kramer, 1995, p 216*).

3. Applied Theory

Applied theory adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan konsep-konsep. Teori ini yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Applied theory dalam penelitian ini adalah:

1) Lapangan Kerja

a. Definisi Lapangan Kerja

Menurut sensus penduduk 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan / usaha / perusahaan / kantor / tempat seseorang bekerja (Badan Pusat Statistik). Permintaan seorang pengusaha memperkerjakan

seseorang dimaksudkan untuk membantu memproduksi barang dan jasa yang akan dijual ke masyarakat atau konsumen. Maka sifat dari fungsi permintaan tersebut tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut.

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dikerjakan, ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu nikmat (*utility*) kepada si pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena memproduksi barang untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Oleh karenanya, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti ini disebut "*derived demand*" (Ibid, 2015). Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu.

Dari masing-masing sektor lapangan pekerjaan itu tentu akan menyerap tenaga kerja. Bagi yang sedikit kreatif tentu tidak hanya memiliki orientasi mencari kerja, namun bisa melihat potensi dan peluang dari berbagai sektor lapangan kerja untuk dijadikan peluang usaha. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan bagi penduduk yang bersangkutan. Kebijakan yang diarahkan pada

perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja harus dilihat dalam hubungan dengan kebijaksanaan yang menyangkut pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

Salah satu kebijaksanaan kesempatan kerja adalah mengadakan identifikasi terperinci, tidak hanya mengenai jumlah angkatan kerja, melainkan juga lokasi dan penggolongan menurut lingkungan hidup, persebaran antara daerah, antar sektor, antar kota/pedesaan dan sebagainya. Kebijakan negara dalam lapangan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing

Bertitik tolak dari kebijaksanaan tersebut maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, Departemen Tenaga Kerja dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memandang perlu untuk menyusun program yang mampu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

b. Sektor Lapangan Kerja

1) Sektor pertanian

- a) Sub sektor pertanian tanaman pangan
- b) Sub sektor perkebunan
- c) Sub sektor perikanan

- d) Sub sektor peternakan
- e) Sub sektor pertanian lainnya
- 2) Sektor industri pengolahan
- 3) Sektor perdagangan
- 4) Sektor jasa
- 5) Sektor angkutan
- 6) Sektor lainnya

c. Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja sangat penting dalam masyarakat karena merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tenaga kerja menjadi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa produk domestik regional bruto (PDRB). Karena pertumbuhan penduduk semakin besar, maka semakin besar juga angkatan kerja yang akan mengisi produksi sebagai input. Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting dari pada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya.

d. Penyediaan Tenaga Kerja

Penyediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja,

pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja.

Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama. Ada orang yang bekerja penuh. Akan tetapi banyak juga orang yang bekerja hanya beberapa jam seminggu atas keinginan dan pilihan sendiri atau karena terpaksa berhubung terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Oleh sebab itu, penyediaan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi perlu juga memperhatikan berapa jam setiap orang itu bekerja dalam seminggu.

Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras akan tetapi banyak juga orang yang bekerja dengan hanya sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara kerja tersebut tentu akan berbeda. Produktivitas kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-tiap individu, tingkat pendidikan dan latihan yang sudah diterima, dan kemampuan manajemen. Orang yang berpendidikan dan/atau latihan yang lebih tinggi pada dasarnya mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi juga. Manajemen yang relatif baik akan mampu mengarahkan karyawannya untuk berproduktivitas kerja tinggi.

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2011). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja.

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah harapan bagi suatu daerah yang harus dicapai agar masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan. Sumber daya manusia dapat diukur Berdasarkan pada angka harapan hidup, pendidikan dan standard hidup yang layak. Setiap daerah memiliki indeks yang berbeda hal ini mencerminkan kualitas hidup di masing masing daerah berbeda sesuai dengan karakteristik daerah dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya indeks pembangunan manusia maka setiap daerah dapat diukur kualitas

hidupnya dan taraf hidup agar daerah tersebut dapat melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.

a. Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan pembuatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam prioritas pembangunan yang dibutuhkan. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

- 1) Indeks Harapan Hidup
- 2) Indeks Pendidikan
- 3) Indeks Standar Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3) \text{ Di mana :}$$

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100.

3) **Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam ekonomi pembangunan tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan perekonomian. *Stake holder* yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan ekonomi yaitu pemerintah dan masyarakat secara umum. Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya Kuznets (2012).

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari produk domestik bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu

proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangannya itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan adanya kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan diikuti oleh peningkatan kemakmuran masyarakat yang biasanya dilihat dari pendapatan domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amri, 2017). Pertumbuhan ekonomi telah lama dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017).

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “Output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita dapat dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan meningkat (Boediono, 2012).

a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pemerintah daerah selalu berupaya agar dapat meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing. Keberhasilan suatu kepala pemerintah daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka dapat dijadikan indikator bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan taraf hidup perekonomian daerahnya sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi malah menurun maka dapat dipastikan bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan program peningkatan untuk kemamkmuran daerahnya.

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh *Robert Solow* yang dikenal dengan model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan data-data daerah. Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan ekonomi regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan Pertumbuhan output, Pertumbuhan output per pekerja, Pertumbuhan output perkapita. Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan

ekonomi regional harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun atau dapat diformulasikan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1) Faktor-Faktor Ekonomi

a) Sumber Alam

Sumber alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu Negara yang kekurangan sumber daya alam tidak akan membangun dengan cepat. Sebagaimana yang dikatakan Lewis dengan hal-hal lain yang sama orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya". Di Negara berkembang sumber daya alam sering terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan tetapi tersedianya sumber alam secara melimpah tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang diperlukan adalah bagaimana cara pemanfaatannya secara cepat. Jika sumber daya alam tidak dipergunakan secara tepat suatu Negara tidak akan mungkin mengalami apa yang disebut kemajuan, jika sumber alam dapat dikembangkan melalui perbaikan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Sarana pengangkutan dan perhubungan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sarana tersebut akan dapat menurunkan biaya angkut dan dapat meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri ataupun dalam dan luar daerah. Dengan begitu perekonomian akan mengalami kemajuan. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup, yang penting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber alam tersebut dapat dipergunakan dalam waktu yang cukup lama.

b) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu akan disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi tetapi juga dapat menaikkan kesempatan kerja. Pembentukan modal dapat pula membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar untuk kemajuan ekonomi.

2) Organisasi Organisasi

Berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, yang bersifat komplemen bagi modal, buruh dan membantu menaikkan produktifitas. Dalam pertumbuhan ekonomi moderen peranan wiraswasta sangat penting, wiraswasta tampil sebagai organisator sekaligus orang yang berani mengambil resiko diantara ketidakpastian. Di negara sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dalam penyediaan overhead sosial. Perekonomian kebanyakan dijalankam oleh pemerintah pusat dan daerah. Perusahaan yang pada umumnya dikelola pemerintah seperti perusahaan umum yang mencakup pertambangan, perkebunan, perdagangan, penyaluran bahan mentah, dan kebutuhan pokok, produksi barang modal dan sebagainya.

3) Kemajuan Teknologi

Dalam proses pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dukungan atas kemajuan teknologi. Dimana proses yang dimaksud berkaitan dengan perubahan yang mencakup metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil penelitian baru. Pertumbuhan teknologi dapat meningkatkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi lain untuk negara sedang berkembang yang dapat memetik sumber ilmu pengetahuan baru dari negara maju.

4) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktifitas. Kedua hal tersebut akan dapat menggiring perekonomian kearah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Dan seperti kita ketahui perekonomian industri akan cepat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, spesialisasi dapat meningkatkan produktifitas buruh yang dapat memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga dipengaruhi oleh luas pasar. Luas pasar akan meningkat akibat dari perekonomian yang meningkat hal tersebut dapat terjadi melalui besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedia atau memadai sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar atau luas maka pembagian kerja dan spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingkatkan dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

5) Faktor Non Ekonomi

Selain faktor-faktor ekonomi yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor non ekonomi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor non ekonomi tersebut yaitu: faktor sosial, faktor manusia dan faktor politik. Kondisi politik suatu negara sangat

mempengaruhi perekonomian negara tersebut, jika suatu negara mengalami krisis politik otomatis perekonomian akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat atau bahkan akan bias mengalami penurunan. Dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat bagi perkembangan ekonomi. Profesor Lewis dengan tepat mengatakan “Tindakan pemerintah memainkan peranan penting dalam merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi.

Faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi perekonomian. Budaya yang sudah mengalami kemajuan akan termotivasi untuk mencari tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, semakin beragam dan semakin banyaknya kebutuhan akan mendorong manusia untuk mencari tambahan pendapatan. Seperti dikemukakan oleh Nurkse bahwa pembangunan ekonomi berkaitan dengan peran manusia, pandangan masyarakat kondisi politik dan latar belakang historis suatu negara. Peran manusia dalam hal ini bukan semata mata tergantung pada kuantitas sumber daya manusianya, akan tetapi bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat efisien dalam menghasilkan output.

4) Industri

a. Definisi Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, definisi dari industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Dalam istilah ekonomi, industri juga mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit, dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif, sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang jadi atau barang setengah jadi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi nilainya dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih. Industri mempunyai dua pengaruh yang penting dalam setiap program pembangunan. Pertama, dalam model dua sekornya Lewis, produktivitas yang lebih besar dalam industri merupakan kunci untuk

meningkatkan pendapatan perkapita. Kedua, industri pengolahan (*manufacturing*) memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar bagi industri substitusi impor (ISI) untuk lebih efisien dan meningkatkan ekspor daripada hanya berkuat pada pasar “primer” (Arsyad, 2011:452).

b. Klasifikasi Industri

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), penggolongan industri dibagi atas empat golongan dengan didasarkan atas banyaknya jumlah tenaga kerja. Empat golongan yaitu:

- 1) Industri Besar, yaitu industri yang menggunakan mesin dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- 2) Industri Sedang, yaitu industri yang menggunakan mesin dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.
- 3) Industri Kecil, yaitu industri yang menggunakan mesin dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.
- 4) Industri Rumah Tangga, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

c. Jenis-Jenis Industri

- 1) Industri Berdasarkan Tempat Bahan Baku
 - a) Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar.

b) Industri non ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

c) Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya.

2) Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal

a) Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.

b) Industri padat karya adalah industri yang lebih menitik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

3) Industri Berdasarkan Produktivitas Perorangan

a) Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung ataupun tanpa diolah terlebih dahulu.

b) Industri sekunder adalah industri bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.

c) Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa.

5) Jumlah Penduduk

Setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda beda hal ini bergantung pada karakteristik daerah tersebut. Jumlah penduduk memiliki potensi dan kontribusi bagi pembangunan ekonomi suatu

daerah namun dapat pula menjadi penghambat pembangunan dengan berbagai faktor. Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. menjelaskan bahwa jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Malthus, berpendapat tentang hubungan antara populasi, upah riil, dan inflasi. Ketika populasi buruh tumbuh lebih cepat dari pada produksi makanan, maka upah riil turun, karena pertumbuhan penduduk menyebabkan biaya hidup yaitu biaya makanan naik.

Hal ini tentunya jumlah penduduk harus dapat dimanfaatkan dengan baik agar tidak menjadi sumber penghambat ekonomi suatu daerah. Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya disebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan kurangnya pengetahuan akan KB. Sementara itu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki penduduk negara sedang berkembang.

Konsep yang populer mengenai ekonomi demografi yaitu konsep transisi demografi. Pada dasarnya konsep ini mencoba menerangkan mengapa hampir semua negara yang kini tergolong sebagai negara maju sama-sama telah melewati sejarah populasi modern yang terdiri dari tiga tahapan besar. Tahap pertama, yaitu masa sebelum modernisasi dimana

negara-negara tersebut memiliki laju pertumbuhan penduduk yang stabil atau sangat lambat. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran dan angka kematian. Tahap kedua, berlangsung setelah adanya modernisasi yang kemudian menghasilkan berbagai metode penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik, makanan yang lebih bergizi, pendapatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas hidup lainnya, sehingga secara bertahap-lahan usia harapan hidup menjadi lebih lama. Akan tetapi penurunan angka kematian tersebut tidak segera diimbangi oleh turunnya angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tajam. Tahapan kedua ini menjadi awal dari proses transisi demografi, yaitu dari keadaan stabil atau laju pertumbuhan penduduk yang lambat ke laju pertumbuhan yang terus meningkat dengan cepat, sebelum pada akhirnya kembali ke laju pertumbuhan yang menurun. Terakhir, tahapan ketiga segera berlangsung dengan munculnya berbagai macam dorongan dan pengaruh upaya-upaya modernisasi pembangunan yang menyebabkan turunnya tingkat kelahiran. Pada akhirnya tingkat kelahiran berhasil turun tajam sampai sama rendahnya dengan angka kematian, sehingga secara netto laju pertumbuhan penduduk menjadi sangat rendah atau bahkan nol.

6) Upah Minimum


Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi,

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu pekerjaan atas dasar suatu perjanjian kerja. (Mulio Nasution, 1994). Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 “Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap”. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengupahan ini juga menegaskan, bahwa Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. (Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2). Upah minimum merupakan standarisasi pengupahan pekerja dengan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditinjau dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian namun masih ada beberapa perusahaan yang membayar upah kerja dibawah upah minimum dikarenakan rendahnya produktivitas tenaga kerja ataupun tidak memenuhi standarisasi pendidikan. Tetapi juga ada yang membayar upah kerja diatas upah minimum bahkan beberapa kali lipat dikarenakan

pekerja memiliki kelebihan keahlian yang sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa sistem yang dapat digunakan untuk pendistribusian upah minimum, dirumuskan dalam empat sistem secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

a. Sistem upah dilihat dari banyaknya produksi



Yaitu upah menurut banyaknya jumlah produksi telah diberikan serta dapat mendorong pegawai/karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas bekerja lebih ulet dan mampu memproduksi barang atau jasa lebih banyak lagi. Produksi yang telah dihasilkan dapat dinilai dan dihargai dengan perhitungan biayanya. Upah sebenarnya juga dapat dicari melalui penggunaan standar normal dengan cara membandingkan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dengan hasil produksi. Secara teorinya sistem upah menurut produksi ini akan diisi pada tenaga-tenaga yang berkompeter dan juga sebaliknya orang-orang tua akan merasa tidak betah.

b. Sistem upah menurut lamanya bekerja

Yaitu Sistem upah seperti ini akan mendorong dan memicu untuk lebih setia dan loyal kepada perusahaan dan lembaga kerja. Sistem ini bisa dibilang sangat menguntungkan bagi yang lansia dan juga generasi muda yang didorong agar tetap bekerja pada perusahaan. Ini kerana adanya harapan bila sudah lansia atau tua akan mendapat perhatian yang lebih. Jadi sistem pengupahan ini akan

memberi perasaan aman dan nyaman kepada pegawai/karyawan, dan juga sistem pengupahan ini bisa memotivasi karyawan.

Dalam memberikan upah juga perlu memperhatikan prinsip dari keadilan. Didalam keadilan bukan berarti bahwa semua sesuatu harus dibagi dengan sama merata. Keadilan terhubungkan pada pengorbanan dan penghasilan. Semakin tinggi dari pengorbanan tersebut maka semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Maka dari itu pertama yang seharusnya dinilai adalah pengorbanan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan, pengorbanan dari suatu jabatan itu dipertunjukkan dari persyaratan-persyaratan (spesifikasi) yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin tinggi persyaratan yang dibutuhkan, semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan. Penghasilan inilah yang ditunjukkan dari upah yang diterima.

Para karyawan sangat memperhatikan rasa keadilan, tidak hanya besarnya uang yang dibawa pulang yang mereka perhatikan, tetapi juga membandingkan dengan rekan yang lain. Disamping masalah keadilan tersebut, dalam pengupahan juga perlu diperhatikan unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain. Namun, bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum.

7) Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan kemampuan melaksanakan ekonomi sendiri. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan daerah tersebut. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang berisi tentang “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desantralisasi”.

Kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”. Menurut (Mahmudi, 2010). Dari definisi

diatas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sendiri agar terciptanya tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan tingkat kemandirian yang baik.

b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menetapkan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Terkandung di dalam Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli daerah Terdiri Dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, menurut Mariot berdasarkan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan menurut Undang- undang nomor 28 tahun 2009 jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) pajak hotel
- b) pajak restoran
- c) Pajak hiburan

- d) pajak reklame
- e) pajak penerangan jalan
- f) pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) pajak parkir
- h) pajak air tanah
- i) pajak sarang burung walet
- j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- k) pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selain itu jenis-jenis retribusi daerah :

a) Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum dan jenis-jenis retribusi jasa umum :

- (1) retribusi pelayanan kesehatan
- (2) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (3) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- (4) retribusi pelayan pemakaman dan penguburan mayat

- (5) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- (6) retribusi pelayanan pasar
- (7) retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (8) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (9) retribusi penggantian biaya cetak peta
- (10) retribusi penyediaan dan atau penyedeton kakus
- (11) retribusi pengolahan limbah cair
- (12) retribusi pelayanan tera/tera ulang
- (13) retribusi pelayanan pendidikan, dan
- (14) retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis-jenis retribusi usaha dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi :

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (2) Retribusi pasar grosir dan aau pertokoan
- (3) Retribusi tempat pelelangan
- (4) Retribusi terminal
- (5) Retribusi tempat khusus parkir
- (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa
- (7) Retribusi rumah potong hewan
- (8) Retribusi tempat pelayanan kepelabuhan

- (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- (10) Retribusi penyebrangan di air dan
- (11) Retribusi penjualan usaha daerah

c) Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- (2) Retribusi izin tempat jualan minuman beralkohol
- (3) Retribusi izin gangguan
- (4) Retribusi izin trayek dan
- (5) Retribusi izin usaha periklanan

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Lain-lain pendapatan asli daerah sah seperti uang dimaksud meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagian akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- f) Hasil pajak daerah

- g) Hasil retribusi daerah
- h) Hasil perusahaan milih daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis telah jadikan referensi adalah berikut ringkasan tabel dari peneliti-peneliti terdahulu:

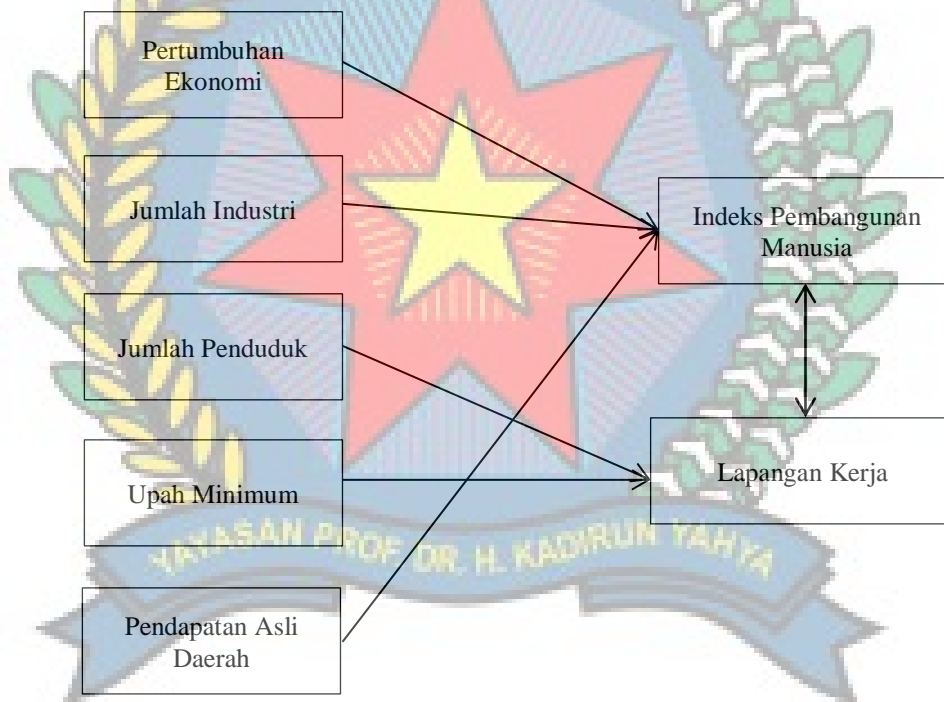
Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Medel Analisis	Hasil Penelitian
1	Herawaty Purwasih (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo	Pertumbuhan Industri (X1), Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2015
2	Muhamma D Nurcholis (2014)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014	Tingkat pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia	Regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif. Sedangkan untuk pengujian F hitung, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
3	Andre Widdyantoro (2013)	Pengaruh PDB, Investasi, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia	PDB UKM, investasi UKM, dan jumlah unit usaha UKM terhadap penyerapan tenaga kerja usaha kecil	Regresi data panel	PDB UKM dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan menengah. Sedangkan, investasi UKM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan menengah.

		Periode 2000-2011	dan menengah		
4	Achma Hendra Setiawan (2010)	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, Nilai Output, Upah Minimum Kota, Jumlah Tenaga Kerja.	Regresi linier berganda.	jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai output dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai output tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha, sedangkan variabel nilai output memiliki pengaruh yang paling kecil di antara variabel yang lain.
5	Nindya Maharditya (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014)	PAD (X1) DAU (X2) DAK (X3) DBS (X4) IPM (Y)	Kuantitatif	PAD dan DAK berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan DAU dan DBH berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal
6	M. Ayub (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Indeks pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015	Pertumbuhan Ekonomi (X1) Pengangguran (X2) Kemiskinan (X3) IPM (Y)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010 hingga tahun 2015 variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia, variabel pengangguran tidak memiliki berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia, sedangkan variabel kemiskinan memiliki negatif dan signifikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

C. Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Diharapkan pemerintah daerah mampu mengatasi fenomena sosial ekonomi terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual di atas, hipotesis penelitian ini adalah :

1. Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Lapangan Kerja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi (2013:14). Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Untuk mendukung analisis kuantitatif digunakan metode analisis Simultan, dimana model ini mampu menjelaskan pengaruh jangka pendek dari masing masing variabel. (Rusiadi, 2013:15).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Peneliti dimulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan selesai. Berikut ini tabel rencana waktu penelitian.

Tabel 3.1. Skedul proses penelitian

No.	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■				
2	Penyusunan Proposal		■	■		
3	Seminar Proposal			■		
4	Perbaikan Acc Proposal				■	
5	Pengolahan Data				■	
6	Penyusunan Skripsi				■	■
7	Bimbingan Skripsi					■
8	Meja Hijau					■

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2022

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini dibutuhkan objek penelitian sebagai sumber informasi pada penelitian ini. Populasi menurut Marihot dan Manuntun (2014:137) populasi penelitian merupakan seluruh elemen/unsur yang akan diamati dan diteliti. Tujuannya yaitu untuk dapat menentukan besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah unit laporan data statistik pemerintah Kota Medan.

2. Sampel

Peneliti menetapkan beberapa sampel yang digunakan dalam menentukan objek penelitian adapun sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Menurut Rusiadi (2014) sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini unit sampel yang digunakan yaitu laporan data statistik pemerintah Kota Medan selama kurun waktu 2015-2020.

D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini ditetapkan beberapa variabel yang akan dianalisis venomena masalah yang terkait. Variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Rusiadi, 2016:50). Menurut Rusiadi (2016:50) menyatakan bahwa variabel merupakan semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Menurut Manullang dan Pakpahan (2014:35) variabel merupakan suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu simbol, atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai. Dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Lapangan Kerja.

2. Defenisi operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan indikator pada penelitian/ Selanjutnya definisi operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel dan indikator yang dikembangkan pada penelitian. Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup variabel penelitian, sehingga

memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan instrumen/alat ukur. (Rusiadi, 2016:88). Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala
1	Lapangan Kerja	Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan / usaha / perusahaan / kantor / tempat seseorang bekerja (Badan Pusat Statistik).	Persen (%)	Rasio
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Data IPM yang digunakan adalah data IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 sampai 2018 (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.	Persen (%)	
3	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah	Miliar Rupiah	Rasio
4	Jumlah Industri	Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi nilainya dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih (Badan Pusat Statistik).	Unit	Rasio
5	Jumlah Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Sumatera Utara selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap tahun 2009 sampai 2018 (dalam satuan jiwa), data diambil dari BPS.	Juta Jiwa	Rasio
6	Upah Minimum	Hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pelaku UMKM yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja.	Juta Rupiah	Rasio
7	Pendapatan Daerah	Merupakan jumlah PAD dan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah	Miliar Rupiah	Rasio

Sumber : Diolah penulis 2022

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran dan laporan anggaran keuangan masing-masing Kabupaten/Kota tahunan yang telah di *release* resmi untuk umum pada periode penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik.

F. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model Regresi Simultan

Pengertian simultan dalam penelitian adalah pengujian untuk meneliti pengaruh variabel secara keseluruhan terhadap variabel dependen yang pada umumnya menggunakan uji F-statistik (arti kata, 2019). Model persamaan simultan merupakan persamaan yang memiliki ciri variabel endogen (variabel terikat) pada suatu persamaan menjadi

variabel penjelas pada sistem persamaan yang lainnya (Gujarati, 2004:729). Regresi simultan digunakan untuk melihat pengaruh jangka pendek antara variabel tersebut.

Model analisis yang digunakan adalah sistem persamaan simultan sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$IPM=C(10)+C(11)*PDRB+C(12)*JI+C(13)*PAD+C(14)*LK+e_1$$

Dimana:

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
- JI = Jumlah Industri
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- LK = Lapangan Kerja
- C = Konstanta
- $\alpha_0 - \alpha_3$ = koefisien regresi
- e_1 = term error

Persamaan 2:

$$LK=C(20)+C(21)*JP+C(22)*UPH+C(23)*IPM+e_1$$

- LK = Lapangan Kerja
- JP = Jumlah Industri
- UPH = Upah
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- C = Konstanta
- $\alpha_0 - \alpha_3$ = koefisien regresi
- e_1 = term error

Asumsi dasar dari analisis regresi adalah variabel di sebelah kanan dalam persamaan tidak berkorelasi dengan *disturbance terms*. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, *Ordinary Least Square (OLS)* dan *Weighted Least Square* menjadi bias dan tidak konsisten. Ada beberapa

kondisi dimana variabel independen berkorelasi dengan *disturbances*.

Contoh klasik kondisi tersebut, antara lain:

- a. Ada variabel endogen dalam jajaran variabel independen (variabel di sebelah kanan dalam persamaan).
- b. *Right-hand-side variables* diukur dengan salah. Secara ringkas, variabel yang berkorelasi dengan residual disebut variabel endogen (*endogenous variables*) dan variabel yang tidak berkorelasi dengan nilai residual adalah variabel eksogen (*exogenous* atau *predetermined variables*).

Pendekatan yang mendasar pada kasus dimana *right hand side variables* berkorelasi dengan residual adalah dengan mengestimasi persamaan dengan menggunakan *instrumental variables regression*. Gagasan dibalik *instrumental variables* adalah untuk mengetahui rangkaian variabel, yang disebut instrumen, yang (1) berkorelasi dengan *explanatory variables* dalam persamaan dan (2) tidak berkorelasi dengan *disturbances*-nya. Instrumen ini yang menghilangkan korelasi antara *right-handside variables* dengan *disturbance*. Gujarati, (1999) mengatakan bahwa dalam persamaan simultan sangat besar kemungkinan variabel endogen berkorelasi dengan *error term*, dalam hal ini variabel *leverage* berkorelasi dengan e_2 , dan variabel dividen berkorelasi dengan e_1 . Dengan kondisi tersebut maka analisis dengan menggunakan regresi biasa (OLS) sangat potensial untuk menghasilkan taksiran yang bias dan tidak konsisten. Selanjutnya dikatakan bahwa metode 2 SLS lebih tepat digunakan untuk

analisis simultan, mengingat dalam analisis ini semua variabel diperhitungkan sebagai suatu sistem secara menyeluruh.

Two-stage-least-square (2SLS) adalah alat khusus dalam *instrumental variables regression*. Seperti namanya, metode ini melibatkan 2 tahap OLS.

Stage 1. Untuk menghilangkan korelasi antara variabel endogen dengan *error term*, dilakukan regresi pada tiap persamaan pada variabel *predetermined variables* saja (*reduced form*). Sehingga di dapat *estimated value* tiap-tiap variabel endogen.

Stage 2. Melakukan regresi pada persamaan aslinya (*structural form*), dengan menggantikan variabel endogen dengan *estimated value*-nya (yang didapat dari *1st stage*).

a. Identifikasi Simultanitas

Untuk melihat hubungan antara variabel endogen maka langkah pertama dilakukan identifikasi persamaan. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan tersebut berada dalam salah satu kondisi berikut ini: *under identified* (tidak bisa diidentifikasi), *exactly-identified* (tepat diidentifikasi) atau *over-identified*. (blogskrpsi-others.blogspot.co.id). Agar metode 2SLS dapat diaplikasikan pada sistem persamaan, maka persyaratan identifikasi harus memenuhi kriteria tepat (*exactly identified*) atau *over identified* (Koutsoyiannis, 1977). Disamping itu, metode 2SLS memiliki prosedur lain, antara lain: tidak ada korelasi residual terms (*endogenous variables*), *Durbin-Watson test*

menyatakan tidak ada variabel di sisi kanan yang berkorelasi dengan *error terms*. Akibat dari autokorelasi terhadap penaksiran regresi adalah:

- 1) Varian residual (*error term*) akan diperoleh lebih rendah daripada semestinya yang mengakibatkan R² lebih tinggi daripada yang seharusnya.
- 2) Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik t dan statistik F akan menyesatkan.

Disamping itu harus dipastikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, untuk itu dilakukan uji asumsi klasik untuk menemukan apakah ada autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa korelasi nilai sisa (*residual value*) antar variabel endogen sangat kecil atau dapat dikatakan tidak ada autokorelasi serta dibuktikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, sehingga metode 2SLS diaplikasikan. Kondisi over identifikasi menyatakan bahwa (untuk persamaan yang akan diidentifikasi) selisih antara total variabel dengan jumlah variabel yang ada dalam satu persamaan (endogen dan eksogen), harus memiliki jumlah yang minimal sama dengan jumlah dari persamaan dikurangi satu.

Sebelum memasuki tahap analisis 2SLS, setiap persamaan harus memenuhi persyaratan identifikasi. Suatu persamaan dikatakan *identified* hanya jika persamaan tersebut dinyatakan dalam bentuk statistik unik, dan menghasilkan taksiran parameter

yang unik (Sumodiningrat, 2001). Memenuhi syarat tersebut maka suatu variabel pada persamaan satu harus tidak konsisten dengan persamaan lain (Gujarati,1999). Dalam hal ini identifikasi persamaan dapat dilakukan dengan memasukkan atau menambah, atau mengeluarkan beberapa variabel eksogen (atau endogen) ke dalam persamaan (Sumodiningrat, 2001). Kondisi *identified* dibagi menjadi dua yaitu: *exactly identified* dan *over identified*. Penentuan kondisi *exactly identified* maupun *over identified* dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$K-k < m-1$: disebut *under identification*

$K-k = m-1$: disebut *exact identification*

$K-k > m-1$: disebut *over identification*

Dimana:

K = jumlah variabel eksogen *predetermined* dalam model

m = jumlah variabel eksogen *predetermined* dalam persamaan

k = jumlah variabel endogen dalam persamaan.

Berdasarkan kriteria diatas maka identifikasi persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Identifikasi Persamaan

No.	Variabel Dependent	$K-k \dots m-1$	Identifikasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Pers. I)	$5-2 = 4-1$	Exactly Identified
2	Lapangan Kerja (Pers. II)	$5-2 > 3-1$	Over Identified

Setelah di ketahui bahwa identifikasi simultanitas persamaan dalam penelitian ini berada pada kondisi *exactly identified* dan *over identified*.

b. Uji Kesesuaian (*Test Goodness of Fit*)

Estimasi terhadap model dilakukan dengan menggunakan metode yang tersedia pada program statistik Eviews versi 10. Koefisien yang dihasilkan dapat dilihat pada output regresi berdasarkan data yang di analisis untuk kemudian diinterpretasikan serta dilihat signifikansi tiap-tiap variabel yang diteliti yaitu:

- 1) Adjust R Square (koefisien determinasi) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas (*independent variable*) menjelaskan variabel terikat (*dependent variabel*).
- 2) Uji serempak (F-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Jika $F_{hit} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

c. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Setelah dilakukan pengujian regresi, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linier berganda dalam menganalisis telah memenuhi asumsi klasik yang dipersyaratkan. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Asumsi model regresi linier klasik adalah faktor pengganggu μ mempunyai nilai rata-rata yang sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan.

Dengan asumsi ini, OLS estimator atau penaksir akan memenuhi sifat-sifat yang diinginkan, seperti ketidakhiasan dan mempunyai varian yang minimum. Untuk mengetahui normal tidaknya faktor pengganggu μ dilakukan dengan Jarque- Bera Test (J-B Test). Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan X^2 probability distribution, yaitu dengan membandingkan nilai JB_{hitung} atau X^2_{hitung} dengan X^2_{tabel} .

Kriteria keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai $JB_{hitung} > X^2_{tabel}$ ($Prob < 0,05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual u_i berdistribusi normal ditolak.
- b) Jika nilai $JB_{hitung} < X^2_{tabel}$ ($Prob > 0,05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual u_i berdistribusi normal diterima.

2) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi linier yang ada dalam model dapat diterima atau tidak. Linieritas model merupakan asumsi yang harus dipenuhi. Pada penelitian ini untuk menguji linieritas model digunakan *Ramsey Test*. Kriteria pengujianya adalah kelinieran dipenuhi oleh data jika nilai uji F lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka dikatakan linieritas model dapat diterima. Angka signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan kelinieran tidak dipenuhi.

3) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel dalam model regresi. Interpretasi dari persamaan regresi linier secara implisit bergantung bahwa variabel-variabel beda dalam persamaan tidak saling berkorelasi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi dengan sempurna, maka disebut multikolinieritas sempurna. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat yaitu:

- a) Variasi besar (dari taksiran OLS).
- b) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar sehingga interval kepercayaan lebar).
- c) Uji-t tidak signifikan. Suatu variable bebas secara substansi maupun secara statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan.
- d) R^2 tinggi tetapi tidak banyak variable yang signifikan dari t-test.
- e) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Dalam model regresi linier berganda juga harus bebas dari *autokorelasi*. Ada berbagai metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala *autokorelasi*. Dalam penelitian ini digunakan metode *Uji Durbin Watson*. Menurut *Durbin Watson*, besarnya koefisien *Durbin Watson* adalah antara 0-4. Kalau koefisien *Durbin Watson* sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi, kalau besarnya mendekati 0, maka terdapat *autokorelasi* positif dan jika besarnya mendekati 4 (empat) maka terdapat *autokorelasi* negatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Variabel Penelitian

Bagian ini menguraikan perkembangan variabel-variabel penelitian yaitu, Lapangan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pendapatan Asli Daerah selama periode penelitian yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Tahun	LK	IPM	PDRB	JI	JP	UPH	PAD
	Unit	Persen	Miliar Rupiah	Unit	Juta Jiwa	Juta Rupiah	Miliar Rupiah
2015	204.379	78,87	124.269.931	960	2.210.624	2.037.000	1.490.027.386
2016	214.250	79,34	132.062.864	1.545	2.229.408	2.271.255	1.535.435.344
2017	238.455	79,98	139.739.342	1.256	2.247.425	2.528.815	1.738.084.105
2018	252.148	80,65	148.007.137	1.256	2.264.145	2.749.074	1.636.204.515
2019	263.729	80,97	156.780.581	1.290	2.279.894	2.969.825	1.829.333.264
2020	224.158	80,98	153.669.776	1.292	2.435.252	3.222.557	1.509.830.671
2021	235.178	81,21	157.689.187	1.301	2.460.858	3.329.867	1.727.934.905
Rata-Rata	233.185	80,29	144.602.688	1.271	2.303.944	2.729.770	1.638.121.456

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

a) Lapangan Kerja

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Data lapangan kerja yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di Medan. Berikut perkembangan data lapangan kerja.

Tabel 4.1. Perkembangan Lapangan Kerja (Unit) di Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Lapangan Kerja
2015	204.379
2016	214.250
2017	238.455
2018	252.148
2019	263.729
2020	224.158
2021	235.178

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 4.1. Lapangan Kerja di Medan Tahun 2015-2021

Sumber : Tabel 4.1.

Dari Tabel 4.1. dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa lapangan kerja di Medan dari tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 204.379 menjadi 214.250. Lalu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Hingga pada tahun 2020, lapangan kerja di kota Medan mengalami penurunan menjadi 224.158 dari tahun sebelumnya yaitu 263.729. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Tahun 2021, lapangan kerja naik menjadi 235.178.

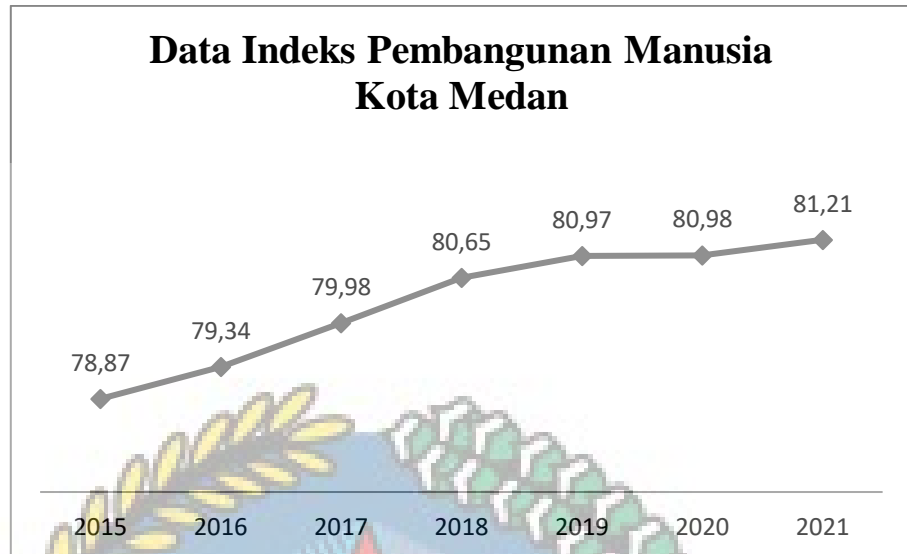
b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat. Data Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di Medan. Berikut perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 4.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (%) di Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2015	78,87
2016	79,34
2017	79,98
2018	80,65
2019	80,97
2020	80,98
2021	81,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 4.2. Indeks Pembangunan Manusia di Medan Tahun 2015-2021

Sumber : Tabel 4.2.

Dari Tabel 4.2. dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Medan dari tahun 2015-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 79,34% dari tahun sebelumnya yaitu 78,87%. Tahun 2017 menjadi 79,98%. Hingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 81,21%.

c) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

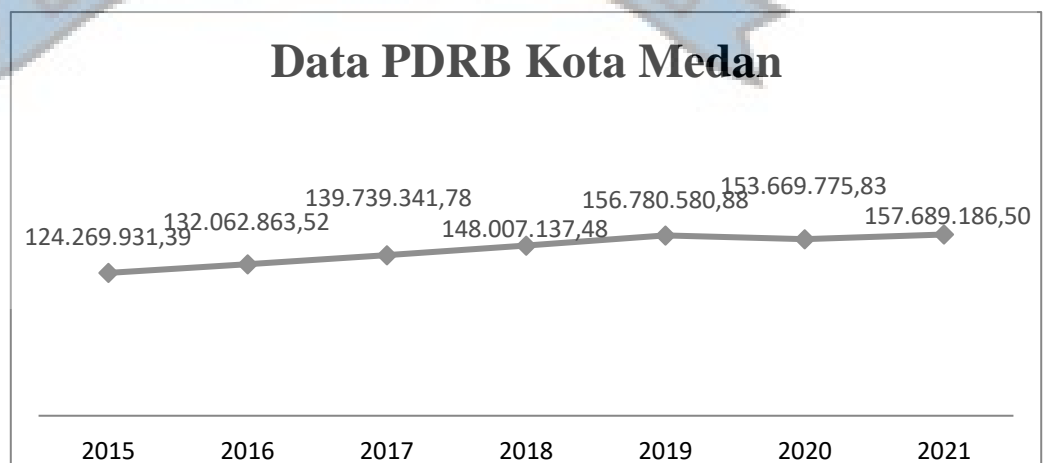
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berikut perkembangan data Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 4.3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) di Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2015	124.269.931,39
2016	132.062.863,52
2017	139.739.341,78
2018	148.007.137,48
2019	156.780.580,88
2020	153.669.775,83
2021	157.689.186,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 4.3. Produk Domestik Regional Bruto di Medan Tahun 2015-2021

Sumber : Tabel 4.3.

Dari Tabel 4.3. dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Medan dari tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 PDRB Kota Medan mengalami peningkatan dari 124.269.931,39 Miliar Rupiah menjadi 132.062.863,52 Miliar Rupiah. Lalu pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto mengalami penurunan dari 156.780.580,88 Miliar Rupiah menjadi 153.669.775,83 Miliar Rupiah. Tahun 2021 PDRB di Kota Medan mengalami kenaikan menjadi 157.689.186,50 Miliar Rupiah. Penurunan PDRB pada tahun 2020 diakibatkan oleh adanya pandemi virus covid-19.

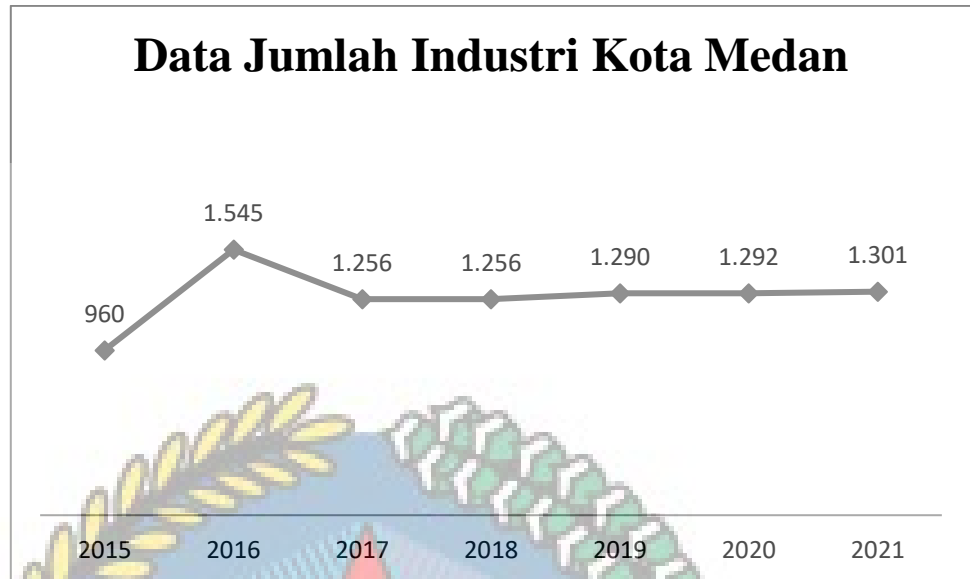
d) Jumlah Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Berikut data jumlah industri di Kota Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 4.4. Perkembangan Jumlah Industri Besar dan Sedang (Unit) di Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Industri
2015	960
2016	1.545
2017	1.256
2018	1.256
2019	1.290
2020	1.292
2021	1.301

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 4.4. Jumlah Industri di Medan Tahun 2015-2021

Sumber : Tabel 4.4.

Dari Tabel 4.4. dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Industri di Medan berfluktuasi dari tahun 2015-2021. Tahun 2016 mengalami kenaikan dari 960 unit pada tahun sebelumnya menjadi 1.545 unit. Lalu pada tahun 2017, jumlah industri di kota Medan mengalami penurunan menjadi 1.256 unit. Angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2021 jumlah industri di kota Medan sebanyak 1.301 unit.

e) Jumlah Penduduk

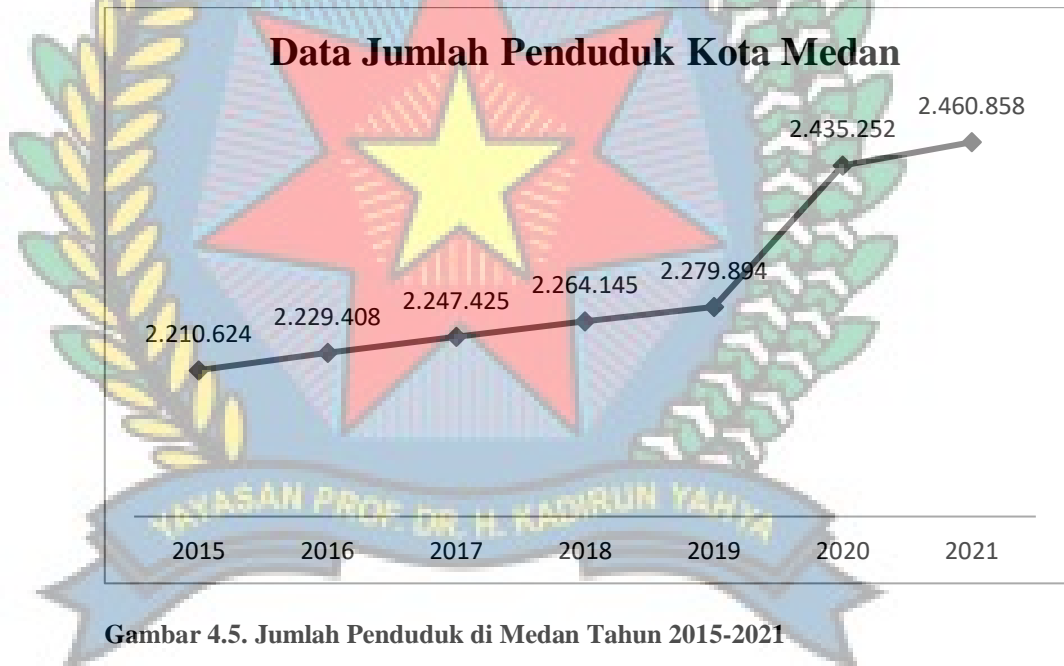
Jumlah penduduk memiliki potensi dan kontribusi bagi pembangunan ekonomi suatu daerah namun dapat pula menjadi penghambat pembangunan dengan berbagai faktor. Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. Berikut

data jumlah penduduk di Kota Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 4.5. Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) di Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Penduduk
2015	2.210.624
2016	2.229.408
2017	2.247.425
2018	2.264.145
2019	2.279.894
2020	2.435.252
2021	2.460.858

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 4.5. Jumlah Penduduk di Medan Tahun 2015-2021

Sumber : Tabel 4.5.

Dari Tabel 4.5. dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk di Medan dari tahun 2015-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan yang terus naik dari tahun ke tahun dimulai jumlah penduduk pada tahun 2015 yang hanya sebanyak 2.210.624 jiwa meningkat menjadi sebanyak 2.229.408 jiwa

pada tahun 2016. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 2.460.858 jiwa.

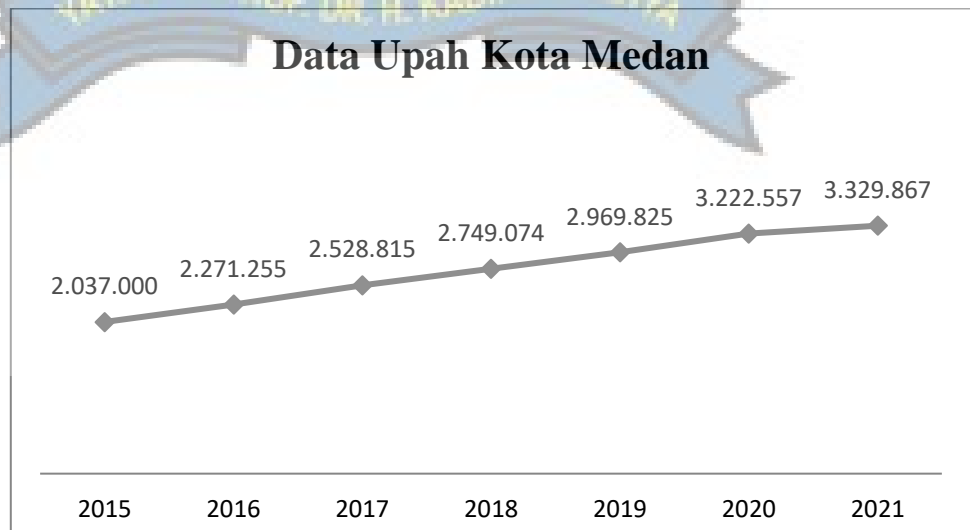
f) Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Berikut perkembangan data upah minimum di Kota Medan dari tahun 2015 sampai tahun 2021.

Tabel 4.6. Perkembangan Upah Minimum (Rupiah) di Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Upah Minimum
2015	2.037.000
2016	2.271.255
2017	2.528.815
2018	2.749.074
2019	2.969.825
2020	3.222.557
2021	3.329.867

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 4.6. Upah Minimum di Medan Tahun 2015-2021

Sumber : Tabel 4.6.

Dari Tabel 4.6. dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa Upah Minimum di Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 upah minimum kota Medan sebesar Rp 2.037.000 meningkat menjadi Rp 2.271.255 pada tahun 2016. Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 2.969.825 dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2020 upah minimum mengalami peningkatan menjadi Rp 3.222.557 dari tahun sebelumnya. Hingga pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 3.329.867.

Penetapan tingkat upah minimum ditetapkan oleh tiap-tiap daerah melalui dewan pengupahan (Keppres RI No. 107 Tahun 2004). Semakin tinggi upah yang dibayarkan kepada pekerja maka semakin berkurang keuntungan yang didapat para pelaku usaha. Dengan rendahnya upah minimum akan memberikan keuntungan lebih bagi para pelaku usaha. Ketika upah minimum yang diberikan tinggi, maka pekerja menjadi pihak yang dirugikan, karena telah bekerja dengan imbalan yang tidak sesuai.

g) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

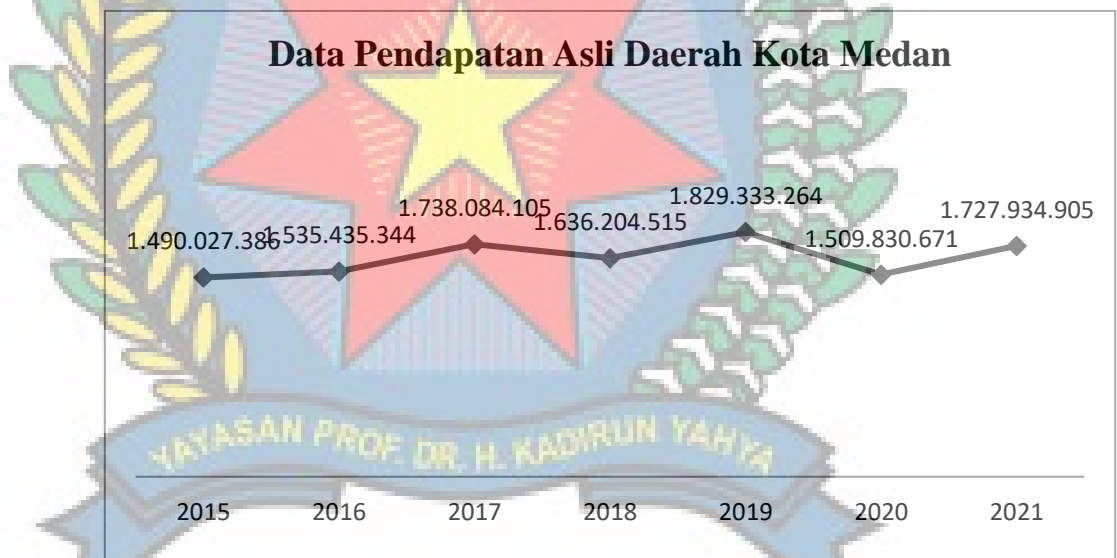
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan kemampuan

melaksanakan ekonomi sendiri. Berikut data Pendapatan Asli Daerah kota Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 4.7. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah) di Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2015	1.490.027.386
2016	1.535.435.344
2017	1.738.084.105
2018	1.636.204.515
2019	1.829.333.264
2020	1.509.830.671
2021	1.727.934.905

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 4.7. Pendapatan Asli Daerah di Medan Tahun 2015-2021

Sumber : Tabel 4.7.

Dari Tabel 4.7. dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Medan dari tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dari 1.490.027.386 Miliar Rupiah menjadi 1.535.435.344 Miliar Rupiah. Lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi

1.636.204.515 Miliar Rupiah. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 1.829.333.264 Miliar Rupiah. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.509.830.671 Miliar Rupiah. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 1.727.934.905 Miliar Rupiah.

2. Uji Asumsi Klasik dan Hasil Regresi Simultan

1. Uji Normalitas

Tabel 4.8. Uji Normalitas Residual IPM dan LK

System Residual Normality Tests
 Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
 Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
 Date: 04/15/22 Time: 18:05
 Sample: 1 7
 Included observations: 7

Component	Skewness	Chi-sq	Df	Prob.
1	-0.931210	1.011678	1	0.3145
2	0.290309	0.098326	1	0.7538
Joint		1.110004	2	0.5741

Component	Kurtosis	Chi-sq	Df	Prob.
1	2.371951	0.115046	1	0.7345
2	2.358210	0.120136	1	0.7289
Joint		0.235182	2	0.8891

Component	Jarque-Bera	Df	Prob.
1	1.126725	2	0.5693
2	0.218461	2	0.8965
Joint	1.345186	4	0.8537

Sumber : Diolah oleh penulis melalui *eviews* 10, 2022

Pada penelitian ini, untuk menguji normalitas data digunakan *Uji Jarque-Bera*. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* test (JB) > alpha 0,05 maka data akan dikatakan normal. Pada tabel diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,8965 > 0,05 sehingga asumsi normalitas dikatakan terpenuhi.

2. Uji Linearitas

Persamaan I : IPM C PDRB JI PAD LK

Tabel 4.9. Uji Linearitas Persamaan I

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: IPM C PDRB JI PAD LK
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	3.102627	1	0.0914
F-statistic	10.53143	(1, 1)	0.0914
Likelihood ratio	13.10087	1	0.0005

Sumber : Diolah oleh penulis melalui *evIEWS* 10, 2022

Pada penelitian ini dengan menguji linearitas dengan menggunakan *Ramsey Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F hitung sebesar 0,0914 > 0,05. Sehingga asumsi linearitas terpenuhi.

Persamaan II : LK C JP UPH IPM

Tabel 4.10. Uji Linearitas Persamaan II

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: LK C JP UPH IPM
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	3.304635	2	0.0806
F-statistic	10.92061	(1, 2)	0.0806
Likelihood ratio	13.05974	1	0.0003

Sumber : Diolah oleh penulis melalui *evIEWS* 10, 2022

Pada penelitian ini dengan menguji linearitas dengan menggunakan *Ramsey Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F hitung sebesar $0,0806 > 0,05$. Sehingga asumsi linearitas terpenuhi.

3. Uji Multikolinearitas

Persamaan I : IPM C PDRB JI PAD LK

Tabel 4.11. Uji Multikolinearitas Persamaan I

Dependent Variable: IPM
Method: Least Squares
Date: 04/16/22 Time: 14:55
Sample: 1 7
Included observations: 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.429358	0.364969	3.916376	0.0594
PDRB	0.130667	0.040323	3.240505	0.0835
JI	-0.015801	0.019088	-0.827805	0.4948
PAD	-0.088379	0.057472	-1.537781	0.2639
LK	0.050939	0.059849	0.851138	0.4843
R-squared	0.917388	Mean dependent var		1.905714
Adjusted R-squared	0.752165	S.D. dependent var		0.005345
S.E. of regression	0.002661	Akaike info criterion		-8.844411
Sum squared resid	1.42E-05	Schwarz criterion		-8.883046
Log likelihood	35.95544	Hannan-Quinn criter.		-9.321939
F-statistic	5.552418	Durbin-Watson stat		2.803409
Prob(F-statistic)	0.158399			

Sumber: Diolah oleh penulis melalui *eviews* 10, 2022

Pengujian Multikolinieritas dilakukan dengan model sebagai berikut:

Hasil persamaan : IPM C PDRB JI PAD LK = 0,0594

Hasil persamaan : PDRB C JI PAD LK = 0,0835

Hasil persamaan : JI C PAD LK PDRB = 0,4948

Hasil persamaan : PAD C LK PDRB JI = 0,2639

Hasil persamaan : LK C PDRB JI PAD = 0,4843

IPM (Y) $R^2 = 0,0594$

PDRB (X1) $R^2 = 0,0835$

JI (X2) $R^2 = 0,4948$

PAD (X3) $R^2 = 0,2639$

LK (X4) $R^2 = 0,4843$

Nilai R2 X1, X2, X3, X4 lebih besar dibandingkan dengan nilai R2 dari Y yaitu 0,0594 sehingga model empiris ditemukan adanya Multikolinieritas.

Persamaan II : LK C JP UPH IPM

Tabel 4.12. Uji Multikolinieritas Persamaan II

Dependent Variable: LK
 Method: Least Squares
 Date: 04/16/22 Time: 14:56
 Sample: 1 7
 Included observations: 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.63540	3.700686	6.386763	0.0078
JP	-3.462255	0.408713	-8.471122	0.0035
UPH	1.212954	0.165660	7.321944	0.0053
IPM	-2.122088	1.541696	-1.376463	0.2624
R-squared	0.975536	Mean dependent var		5.365714
Adjusted R-squared	0.951072	S.D. dependent var		0.038668
S.E. of regression	0.008553	Akaike info criterion		-6.389434
Sum squared resid	0.000219	Schwarz criterion		-6.420343
Log likelihood	26.36302	Hannan-Quinn criter.		-6.771457
F-statistic	39.87619	Durbin-Watson stat		3.193059
Prob(F-statistic)	0.006448			

Sumber: Diolah oleh penulis melalui *eviews* 10, 2022
 Pengujian Multikolinieritas dilakukan dengan model sebagai berikut:

- Hasil persamaan : LK C JP UPH IPM = 0,0078
- Hasil persamaan : JP C UPH IPM = 0,0035
- Hasil persamaan : UPH C IPM JP = 0,0053
- Hasil persamaan : IPM C JP UPH = 0,2624

- LK (Y) R2 = 0,0078
- JP (X1) R2 = 0,0035
- UPH (X2) R2 = 0,0053
- IPM (X3) R2 = 0,2624

Nilai R2 X1, X2 lebih KECIL dibandingkan dengan nilai R2 dari Y yaitu 0,0078 sehingga model empiris tidak ditemukan adanya Multikolinieritas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.13. Uji Autokorelasi

System Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h

Date: 04/15/22 Time: 18:08

Sample: 1 7

Included observations: 7

Lags	Q-Stat	Prob.	Adj Q-Stat	Prob.	Df
1	5.503851	0.2394	6.421159	0.1698	4
2	9.387768	0.3106	11.85864	0.1576	8
3	12.42002	0.4126	17.16509	0.1435	12
4	14.04508	0.5954	20.95688	0.1802	16
5	14.55089	0.8015	22.72724	0.3024	20
6	14.69997	0.9292	23.77079	0.4748	24
7	14.69997	0.9814	NA	NA	28
8	14.69997	0.9962	NA	NA	32
9	14.69997	0.9994	NA	NA	36
10	14.69997	0.9999	NA	NA	40
11	14.69997	1.0000	NA	NA	44
12	14.69997	1.0000	NA	NA	48

*The test is valid only for lags larger than the System lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution

Sumber : Diolah oleh penulis melalui *eviews* 10, 2022

Berdasarkan hasil *df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution* di atas dapat diketahui bahwa seluruh indikator pergerakan lag dari waktu ke waktu tidak menunjukkan adanya efek autokorelasi dalam melakukan pergerakan data, dimana nilai prob Q-stat seluruhnya melebihi 0,05 maupun 0,10 sehingga terbukti bahwa tidak ada di dalam data mempunyai efek autokorelasi.

5. Hasil Penelitian Regresi Simultan

Estimasi untuk mengetahui pengaruh variabel secara 2 persamaan simultan dilakukan dengan menggunakan model *Two-Stage Least Squares*. Hasil estimasi sistem persamaan dengan *Two-Stage Least Squares* ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14. Hasil Estimasi Persamaan *Two-Stage Least Squares*

System: SIMULTAN
 Estimation Method: Two-Stage Least Squares
 Date: 04/12/22 Time: 23:02
 Sample: 1 7
 Included observations: 7
 Total system (balanced) observations 14

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(10)	1.453055	0.366448	3.965238	0.0107
C(11)	0.128387	0.040476	3.171924	0.0248
C(12)	-0.015654	0.019146	-0.817630	0.4508
C(13)	-0.092799	0.057729	-1.607491	0.1689
C(14)	0.057494	0.060208	0.954931	0.3835
C(20)	25.36280	4.807704	5.275450	0.0033
C(21)	-3.559943	0.457078	-7.788474	0.0006
C(22)	1.285333	0.210485	6.106539	0.0017
C(23)	-2.946642	2.109986	-1.396522	0.2214

Determinant residual covariance 5.65E-11

Equation: $IPM=C(10)+C(11)*PDRB+C(12)*JI+C(13)*PAD+C(14)*LK$

Instruments: PDRB JI PAD JP UPH C

Observations: 7

R-squared	0.916893	Mean dependent var	1.905714
Adjusted R-squared	0.750679	S.D. dependent var	0.005345
S.E. of regression	0.002669	Sum squared resid	1.42E-05
Durbin-Watson stat	2.724516		

Equation: $LK=C(20)+C(21)*JP+C(22)*UPH+C(23)*IPM$

Instruments: PDRB JI PAD JP UPH C

Observations: 7

R-squared	0.973203	Mean dependent var	5.365714
Adjusted R-squared	0.946406	S.D. dependent var	0.038668
S.E. of regression	0.008952	Sum squared resid	0.000240
Durbin-Watson stat	2.645222		

Sumber : Diolah oleh penulis melalui *eviews* 10, 2022

Berdasarkan hasil output persamaan struktural dapat diketahui adanya 2 persamaan, berikut ini merupakan penjelasan dalam 2 persamaan :

a. Hasil Uji Persamaan 1

Persamaan pertama ialah persamaan yang dipakai untuk mengetahui secara simultan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dengan persamaan sebagai berikut :

$$IPM=C(10)+C(11)*PDRB+C(12)*JI+C(13)*PAD+C(14)*LK$$

Berdasarkan persamaan tersebut hasil output eviews dengan model *Two-Stage Least Squares*, sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1.453055 + 0.128387 * \text{PDRB} - 0.015654 * \text{JI} - 0.092799 * \text{PAD} + 0.057494 * \text{LK}$$

Menurut hasil estimasi yang didapatkan menunjukkan bahwa $R^2 = 0.916893$ yang bermakna bahwa variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), JI (Jumlah Industri), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan LK (Lapangan Kerja) dapat menjelaskan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 91,68% dan sisanya sebesar 8,32% IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dipengaruhi oleh variabel lain diluar estimasi dalam model.

Berdasarkan hasil estimasi yang didapatkan t-hitung, terdapat (satu) variabel yang secara signifikan mempengaruhi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 5\%$, nilai probability $0,0248 < 0,05$ sehingga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Variabel lainnya yaitu JI (Jumlah Industri) dengan nilai probability $0,4508 > 0,05$, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan nilai probability $0,1689 > 0,05$ dan LK (Lapangan Kerja) dengan nilai probability $0,3835 > 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) karena nilai probability ketiga variabel tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar variabel sangat signifikan mempengaruhi IPM

(Indeks Pembangunan Manusia) di Medan sehingga akurasi penelitian sangat diandalkan.

1. Koefisien dan Elastisitas PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Berdasarkan koefisien regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) positif sebesar 0,128 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap PDRB sebesar 1 persen maka IPM akan meningkat sebesar 0,128 persen. Dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E_{PDRB} = \text{Koef. PDRB} \times \frac{PDRB}{IPM} = 0,128 \times \frac{144602688}{80,29} = 230528,63 > 1$$

Elastis

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai positif *elastis* yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan PDRB maka akan menghasilkan persentase penambahan nilai IPM yang lebih besar.

2. Koefisien dan Elastisitas JI (Jumlah Industri)

Berdasarkan koefisien regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk JI (Jumlah Industri) negatif sebesar 0,015 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap JI sebesar 1 persen maka IPM akan menurun sebesar 0,015 persen. Dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E_{JI} = \text{Koef. JI} \times \frac{JI}{IPM} = -0,015 \times \frac{1271}{80,29} = -0,237451 < 1 \text{ inElastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif *in elastis* yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan JI maka akan menghasilkan persentase pengurangan nilai IPM yang lebih kecil.

3. Koefisien dan Elastisitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan koefisien regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) negatif 0,092 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap PAD sebesar 1 persen maka IPM akan menurun sebesar 0,092 persen. Dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E_{PAD} = \text{Koef. PAD} \times \frac{PAD}{IPM} = -0,092 \times \frac{1638121456}{80,29} = -1877035,42 < 1$$

inElastis

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif *in elastis* yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan PAD maka akan menghasilkan persentase pengurangan nilai IPM yang lebih kecil.

4. Koefisien dan Elastisitas LK (Lapangan Kerja)

Berdasarkan koefisien regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk LK (Lapangan Kerja) positif 0,574 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap LK sebesar 1 persen maka IPM akan menurun sebesar 0,574 persen. Dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E_{LK} = \text{Koef. LK} \times \frac{LK}{IPM} = 0,574 \times \frac{233185}{80,29} = 1667,05 > 1 \text{ **Elastis**}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai positif *elastis* yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan LK maka akan menghasilkan persentase penambahan nilai IPM yang lebih besar.

b. Hasil uji persamaan 2

Persamaan kedua ialah persamaan yang dipakai untuk mengetahui secara simultan terhadap LK (Lapangan Kerja), dengan persamaan sebagai berikut:

$$LK=C(20)+C(21)*JP+C(22)*UPH+C(23)*IPM$$

Berdasarkan persamaan tersebut hasil output eviews dengan model *Two Stage Least Square* , sebagai berikut:

$$LK=25.36280-3.559943*JP+1.285333*UPH-2.946642*IPM$$

Menurut hasil estimasi yang didapatkan menunjukkan bahwa $R^2 = 0,973203$ yang bermakna bahwa variabel JP (Jumlah Penduduk), UPH (Upah) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dapat menjelaskan LK (Lapangan Kerja) sebesar 97,32% dan sisanya sebesar 2,68% LK (Lapangan Kerja) dipengaruhi oleh variabel lain diluar estimasi dalam model.

Berdasarkan hasil estimasi yang didapatkan nilai t-hitung, terdapat 2 (dua) variabel yang secara signifikan mempengaruhi LK (Lapangan Kerja) yaitu JP (Jumlah Penduduk) pada $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 5\%$, nilai probability $0,0006 < 0,05$ sehingga JP (Jumlah Penduduk) berpengaruh signifikan terhadap LK (Lapangan Kerja). Variabel lainnya yaitu UPH (Upah) juga signifikan pada $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 5\%$, nilai probability $0,0017 < 0,05$ sehingga variabel UPH (Upah) berpengaruh secara signifikan terhadap LK (Lapangan Kerja). Variabel lainnya yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan nilai probability $0,2214 > 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap LK (Lapangan Kerja) karena nilai

probability variabel tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar variabel sangat signifikan mempengaruhi LK (Lapangan Kerja) di Medan sehingga akurasi penelitian sangat diandalkan.

1. Koefisien dan Elastisitas JP (Jumlah Penduduk)

Berdasarkan koefisien regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk JP (Jumlah Penduduk) negatif 3,559 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap JP sebesar 1 persen maka akan menurunkan LK (Lapangan Kerja) sebesar 3,559 persen. Dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E_{JP} = \text{Koef. JP} \times \frac{JP}{LK} = -3,559 \times \frac{2303944}{233185} = -35,16 < 1 \text{ inElastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif *inelastis* yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan JP maka akan menghasilkan persentase pengurangan nilai LK yang lebih kecil.

2. Koefisien dan Elastisitas UPH (Upah)

Berdasarkan koefisien regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk UPH (Upah) positif 1,285 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap UPH sebesar 1 persen maka akan menambah LK (Lapangan Kerja) sebesar 1,285 persen. Dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E_{UPH} = \text{Koef. UPH} \times \frac{UPH}{LK} = 1,285 \times \frac{2729770}{233185} = 15,04 > 1 \text{ Elastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai positif *elastis* yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan UPH maka akan menghasilkan persentase penambahan nilai LK yang lebih besar.

3. Koefisien dan Elastisitas IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Berdasarkan koefisien regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) negatif 2,946 mengandung arti bahwa peningkatan terhadap IPM sebesar 1 persen maka akan menurunkan LK (Lapangan Kerja) sebesar 2,946 persen. Dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E_{IPM} = Koef.IP M \times \frac{IPM}{LK} = -2,946 \times \frac{80,29}{233185} = -0,001 < 1 \text{ inElastis}$$

Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif *inelastis* yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan IPM maka akan menghasilkan persentase pengurangan nilai LK yang lebih kecil.

B. Pembahasan Penelitian

Analisis pengaruh simultan adalah mempertimbangkan pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), JI (Jumlah Industri), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan LK (Lapangan Kerja) untuk persamaan 1 yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Mempertimbangkan pengaruh JP (Jumlah Penduduk), UPH (Upah), dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) untuk persamaan 2 yaitu LK (Lapangan Kerja).

1. Pengaruh Simultan Persamaan 1 : Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Jumlah Industri, Pendapatan Asli Daerah dan Lapangan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ternyata IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto). Sedangkan variabel lain yaitu JI (Jumlah Industri), PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan LK (Lapangan Kerja) tidak dipengaruhi secara signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

a. Pengaruh PDRB terhadap IPM

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya jika PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Athirah Binti Mohamad Roshaniza (2015) yang menyatakan bahwa PDB memiliki hubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nurul Fadillah, dkk yang berjudul *Analysis of Factors Affecting Human Development Index In Special Regional of Yogyakarta*. Penelitian ini sama dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output perkapita (Todaro, 2008). Dalam hal ini pertumbuhan output yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingginya pertumbuhan output akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkat dan dalam hal ini akan meningkatkan tingkat daya beli. Tingginya tingkat daya beli di masyarakat akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, karena daya beli

masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari segi pendapatan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Medan.

b. Pengaruh jumlah industri terhadap IPM

Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa jumlah industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dapat dinyatakan bahwa jumlah industri yang ada di kota Medan tidak memiliki pengaruh dengan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2022) Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia.

c. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap IPM

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah sebagai pengukur pendapatan daerah sendiri yang sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Setyowati dan Suparwati, 2012).

Hasil penelitian saya menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayani dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian yang juga sejalan adalah penelitian dari Tirza Mareny Patadang, dkk yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitiannya menyatakan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra, dkk. (2015) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian Tia Rizna Pratiwi, dkk, yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2013-2015”, juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

d. Pengaruh lapangan kerja terhadap IPM

Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa lapangan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia. Hal ini berarti lapangan kerja tidak memiliki hubungan dengan indeks pembangunan manusia yang ada di kota Medan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabelah Farrasy Jannaty (2018) yang menunjukkan bahwa lapangan kerja signifikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjar.

2. Pengaruh Simultan Persamaan 2: Pengaruh JP (Jumlah Penduduk), UPH (Upah) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap LK (Lapangan Kerja)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ternyata LK (Lapangan Kerja) dipengaruhi secara signifikan oleh JP (Jumlah Penduduk) dan UPH (Upah). Variabel lainnya yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tidak berpengaruh signifikan terhadap LK (Lapangan Kerja).

a. Pengaruh jumlah penduduk terhadap lapangan kerja

Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap lapangan kerja. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Akbar Siregar (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap lapangan kerja di Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh David E Clark, dkk (1996) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dan lapangan kerja terjadi secara simultan, meskipun efek umpan balik

tampaknya tidak kuat. Hal ini berarti tingginya jumlah penduduk yang ada di kota Medan maka akan mengakibatkan menurunnya lapangan kerja yang ada di kota Medan.

b. Pengaruh upah terhadap lapangan kerja

Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap lapangan kerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samuel Randy Tapparan (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara upah terhadap lapangan kerja. Hasil penelitiannya menyatakan upah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut penelitian Richard Dickens, dkk (1999) upah minimum secara signifikan menekan distribusi pendapatan tetapi tidak berdampak negatif pada pekerjaan.

Sesuai dengan teori yang ada mengenai permintaan tenaga kerja, kenaikan upah minimum justru akan menurunkan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja pun juga menurun. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh terhadap meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat lapangan kerja.

c. Pengaruh IPM terhadap lapangan kerja

Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap lapangan kerja. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi lapangan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas maka terjadi penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun maka permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran dan membuka lapangan kerja. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfredo Y Mahihody, dkk (2018) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan yang negatif terhadap lapangan kerja yang ada di kota Manado. Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Amelia, dkk (2021) yang berjudul *Effect Of Economic Growth, Education Level And Human Development Index To Employment Opportunity In North Sumatera Province*, yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap lapangan kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian pada persamaan pertama terlihat bahwa hanya variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dikarenakan tingginya tingkat PDRB akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkat dan dalam hal ini akan meningkatkan tingkat daya beli. Tingginya tingkat daya beli di masyarakat akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi tingkat PDRB maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di kota Medan. Sementara variabel jumlah industri, pendapatan asli daerah, dan lapangan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penyebabnya bisa dikarenakan jumlah industri yang tidak beroperasi dan jumlah lapangan kerjanya semakin sedikit sehingga banyak masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada persamaan dua diketahui variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap lapangan kerja. Sementara variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap lapangan kerja, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap lapangan kerja. Tidak berpengaruhnya

jumlah penduduk terhadap lapangan kerja bisa dikarenakan jumlah penduduk masih lebih didominasi oleh usia nonproduktif, sehingga jumlah lapangan pekerjaan untuk masyarakat masih banyak. Sementara untuk indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap lapangan kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi supaya bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia.
2. Mendorong sektor industri untuk lebih ditingkatkan agar berdampak positif pada indeks pembangunan manusia dan meningkatkan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Medan.
4. Meningkatkan indeks pembangunan manusia supaya generasi muda lebih termotivasi menciptakan lapangan kerja sendiri.
5. Memaksimalkan pengendalian jumlah penduduk supaya tidak terjadi penambahan jumlah pengangguran yang berlebihan serta memaksimalkan penyediaan lapangan kerja.
6. Pemerintah daerah harus berperan aktif terhadap penetapan upah minimum agar tidak terjadi diskriminasi pada karyawan atau tenaga kerja.

7. Penelitian berikutnya diharapkan memasukkan variabel-variabel eksogen lain yang berpengaruh terhadap variabel dalam yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mulya Pratomo (2019). *Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Industri terhadap Pengangguran Di Provinsi Jawa Barat*, Vol. 1 no.1,2007, Bandung.
- Arifatul Chusna (2013). *Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*. UNES. Semarang
- Budiono. (2012). *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*, Yogyakarta: YPK.
- Darise. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: YKPN.
- Debora, D. (2010). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan*. *Akuntansi Publik*, 54-58.
- Edwards, M. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*. Universitas Diponegoro, 56-69.
- Herawaty Purwasih (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julianti (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kisra, J. (2014). *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagan Raya*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 54-61.
- Kuznet. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi (2010). *Pengelolaan keuangan daerah. Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*.
- Nadia Ika Purnama (2015) (2009). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap tingkat Pengangguran Di Kota Medan*. USU. Medan.
- Muminin dan Hidayat (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun2011-2015*. Universitas Surabaya.
- Mankiw, G (2010). *Makro Ekonomi*. Erlangga, Jakarta

- Manullang dan Pakpahan (2014). Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.
- Mardiasmo (2011) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.Yogyakarta.
Mardiasmo. (2008). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui
- Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1. Hal 1-17.
- Nadia Ika Purnama (2015). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah. UNES. Semarang
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Perumbuhan Ekonomi Daerah kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Unevirsitas Muhammadiyah Malang.
- Riyadi Nurohman (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah.
- Rusiadi, et al, (2013). Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan. Medan : USU Press.
- Tambunan, T. H (2011), Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Panji (2011). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Putong, I (2018). TeoriPengantar Mikro dan Makro. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Reza Monanda Berutu (2009). Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Rusiadi, et al, (2013). Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan. Medan : USU Press.
- Sukirno, S (2012). Teori Pengantar Makro. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sugiyono, (2014). Metode Peneiltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsana dan Rahardjo (2013). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Safuridar (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Timur. Universitas Syah Kuala. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <http://www.bps.go.id>

<http://www.pemprovsn.go.id>

